

No. 164 September - Oktober 2019

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



PORTAL ANALISIS DATA
BERBASIS PETA DI KOTA MANADO

TEKAD KUAT DI TELUK KIMI

MENJADI MINORITAS, MEMAHAMI TOLERANSI

PEREMPUAN DALAM RANTAI
PERDAGANGAN PALA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X





BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL

Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**NEWS**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews

September - Oktober 2019

No. 164

- 1** Tekad Kuat di Teluk Kimi
- 5** Portal Analisis Data Berbasis Peta di Kota Manado
Oleh **RAHMAT HARDIANSYA**
- 9** Tantangan Data Kependudukan di Papua
Oleh **SYAIFULLAH**
- 13** Replikasi Praktik Cerdas Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)
Oleh **NEHRU SAGENA**
- 17** Menjadi Minoritas, Memahami Toleransi
Oleh **ABDUL MASLI**
- 21** Perempuan dalam Rantai Perdagangan Pala
Bagian 1
Oleh **BERNADINUS STENI**
- 25** Membuat Masalah Masyarakat Menjadi Masalah Pemerintah Refleksi Seorang Mantan Bupati di Indonesia
Oleh **SUYOTO dan KARRIE MCLAUGHLIN**
- 29** Kebijakan yang Berpihak Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku
Oleh **LUSIA PEILOUW**
- 32** Sertifikasi Jamin Sejuta Ikan
Oleh **SITI ZALEHA SOEBARINI**
- 36** Neraca Pangan
Oleh **A.M. SALLATU**
- 39** Iklan BaKTINews Online
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

Foto Cover : Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI



Pengrajin kain tenun khas Timor dari Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Foto: **Abdul Masli**



Tekad Kuat di Teluk Kimi

Kepala Distrik Teluk Kimi memiliki tekad kuat mewujudkan terbangunnya Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID). Tapi syaratnya cukup berat, 5 kampung di Distrik Teluk Kimi harus menyelesaikan terlebih dulu Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) mereka.



Pelatihan penginputan data melalui aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) dan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang diikuti oleh kader kampung/distrik di Papua. Mereka nantinya akan ditempatkan sebagai koordinator di setiap kampung untuk membantu pemerintah kampung dalam perencanaan, monitoring, dan pembangunan kampung.

Foto: **Tim KOMPAK - LANDASAN II**

kampungnya masing-masing. Selama ini, memang ada berbagai macam alasan yang menyebabkan kader tidak dapat menyelesaikan SAIK di kampungnya dengan cepat. Misalnya, kader tidak mendapat dukungan kuat dari kepala kampung. Contohnya di Kampung Air Mandidi, hanya ada satu laptop, yakni laptop operasional Sekretaris kampung (Sekkam). Jika kader meminjamnya dan sedang menginput data, bisa tiba-tiba datang Sekkam memintanya untuk keperluan lain.

Bu Anike berpikir keras. Harus ada jalan keluar, batinnya. “Kita kerjakan secara keroyokan,” katanya kepada Yuni, Koordinator Distrik Teluk Kimi dan para kader kampung. Jadi, para kader di lima kampung bekerjasama mengisi kekurangan. Para ketua RT dikerahkan membantu. Donny, Kader dari kampung Waharia yang sudah lebih dulu merampungkan SAIK Waharia turut mendukung. Ia siap mengambil alih proses inputnya.

Setelah menunggu sekian hari, lewat satu bulan, cara itu tidak berjalan. Proses pendataan tetap mandek. Bu Anike nyaris putus asa. Dia bahkan bilang ke Yuni, untuk mengambil alih proses pendataan rumah tangga. Bu Anike meminta Yuni mengajarkan bagaimana mengisi form pertanyaan. Tentu saja itu hanya ide spontan yang tak mungkin bisa dijalankan.

Masalah sesungguhnya adalah pada pola sebaran penduduk yang tidak merata. Tidak seperti di Distrik Uwapa, daerah transmigran di mana permukiman memusat di satu tempat. Di Teluk Kimi, permukiman kampung tidak terkonsentrasi di satu tempat. Rumah-rumah berjauhan. Belum lagi kalau rumah yang jauh itu bisa dikunjungi tapi ternyata pemiliknya tidak ada, ke kebun atau ke kandang babi milik keluarga.

Bu Anike gregetan. Menurutnya, jumlah rumah tangga di setiap kampung di Teluk Kimi belum seberapa. Hanya 300-an saja. Bandingkan dengan desa-desa di Sulawesi Selatan berkisar 600 KK, atau Jawa Timur yang bisa mencapai 5 - 7 ribu

Dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan, dan SOP Puskesmas juga harus lengkap. Demikian juga dokumen-dokumen sekolah harus lengkap. Karena SAID itu menjadi rumah integrasi kampung, sekolah, dan Puskesmas di tingkat distrik. Ini salah satu tanggung-jawab kepala distrik. Sebagai kepala distrik, beliau harus bertindak sebagai manajer wilayah yang mengintegrasikan layanan dasar di Distrik Teluk Kimi.

Kepala distrik berinisiatif mengundang kader-kader dan kepala kampung dari 5 kampung untuk bertemu. Ia ingin supaya para kader kampung bahu-membahu menyelesaikan SAIK di



Anike pun sudah boleh tersenyum bangga melihat perkembangan yang terjadi di Distrik Teluk Kimi.

rumah tangga perdesa. Lagi pula, dia merasa dirinya sebagai kepala distrik sudah berusaha keras.

Sungguh, Bu Anike sebagai kepala distrik sangat berharap bisa berbuat yang lebih untuk kelima kampung ini. Sebelum ia menjabat sebagai kepala distrik pada 2017, ia menjadi sekretaris distrik. Ia lebih banyak berada di dalam kantor. Meski mempunyai banyak gagasan untuk pembangunan distriknya, dia tidak bisa leluasa

Kiri : Diskusi bersama KOMPAK LANDASAN yang dihadiri juga oleh perwakilan dari DFAT.

Kanan : Ibu Anike, Kepala Distrik Teluk Kimi bersama Tim KOMPAK-LANDASAN II melaksanakan pelatihan Pendamping Teknis Pemerintahan Kampung hingga terbentuk Tim Pembina Teknik Pemerintah Desa (PTPD) Distrik Teluk Kimi yang bertugas mendorong dan memonitoring pendataan dan penginputan data SAIK.

Foto : **Tim KOMPAK - LANDASAN II**

bergerak. Ia nyaris tidak memainkan peran penting untuk distriknya. Sekarang saatnya bagi Anike untuk berbuat yang terbaik.

Bu Anike belum menyerah. Ia masih punya peluang. Tahun lalu, saat ia masih menjabat sebagai sekretaris distrik, Tim KOMPAK-LANDASAN II melaksanakan pelatihan Pendamping Teknis Pemerintahan Kampung. Salah satu *output* dari pelatihan itu adalah terbentuknya Tim Pembina Teknik Pemerintah Desa (PTPD) Distrik Teluk Kimi. Tim ini belum pernah difungsikan. Maka Ibu Anike pun menghidupkan tim ini dan memberi tugas mendorong dan memonitoring pendataan dan penginputan data SAIK.



Pada 18 Mei 2018, Tim PTPD dipimpin Bu Anike mendatangi pemerintah Kampung Air Mandidi dan Kampung Kimi. Lalu pada 22 Mei 2018, tim mendatangi Kampung Lani dan kemudian ke Kampung Samabusa. Bagi Bu Anike, tim ini akan jadi strategis dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah kampung.

Sejauh ini hasilnya menggembirakan. Pada bulan Agustus 2019, empat kampung di Distrik Teluk Kimi telah menyelesaikan input data SAIK yaitu Kampung Teluk Kimi, Kampung Waharia, Kampung Lani dan Kampung Air Mendidih. Sedangkan Kampung Samabusa masih dalam proses penginputan 90%. Seluruh kampung direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2019.

Anike berencana mengoptimalkan peran PTPD, dan ia berencana dari 5 anggota tim PTPD ini masing-masing akan ditempatkan sebagai koordinator di setiap kampung untuk membantu pemerintah kampung dalam perencanaan, monitoring, dan pembangunan kampung.

Anike pun sudah boleh tersenyum bangga melihat perkembangan yang terjadi di Distrik Teluk Kimi. Sekolah-sekolah mulai bergairah meningkatkan mutu layanan, Puskesmas juga semakin dekat dengan masyarakat, dan kampung sudah berusaha mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam waktu dekat SAID sudah jadi, dan Anike pun bisa menjalankan peran sebagai manajer wilayah yang mengoptimalkan sinergi antara semua unit layanan dan kampung dengan lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK LANSASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id

Saat Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan terpilih jadi Walikota dan Wakil Walikota Manado 2016 silam, mereka dihadapkan pada masalah serius.

Tingkat penyerapan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangat rendah.

Masalah ini kian rumit setelah mengetahui sistem penagihan yang belum tertata dengan baik. Banyak data yang tidak sesuai. Perpindahan wajib pajak belum terdata. Ini mendorong pemerintah kota menggunakan teknologi sebagai solusi.

“Saya bukan seorang *programmer*, tapi saya mengatakan ke mereka, dengan permasalahan yang ada, kita bisa menggunakan teknologi sebagai solusi agar pelayanan bisa diberikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Mor Dominus Bastiaan, Wakil Walikota Manado periode 2016-2020.

Sejak itu, Pemerintah Kota Manado mulai melakukan curah pendapat dan memetakan masalah. Mereka mendesain peta tematik hingga menyusun diagram alir.

Sebuah perangkat kerja bernama *Cerdas Command Center (C3)* dibentuk. Cerdas adalah akronim dari Cendekia, Ekowisata, Religi, Daya Saing, Aman damai dan Sehat Sejahtera. Perangkat kerja ini berada di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika.



PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA DI KOTA MANADO

Oleh **RAHMAT HARDIANSYA**

Bersamaan dengan itu, dibuat pula SiGita (Sistem Gabungan Aplikasi Perangkat Daerah) yang khusus digunakan untuk mengatur perpajakan dan perizinan berbasis peta 1:5000. SiGita dikomandoi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado. Kepala Bapelitbangda Kota Manado Liny Tambajong didapuk sebagai penanggungjawab utama. Koordinasi lintas instansi guna mewujudkan visi Manado sebagai kota cerdas (*smart city*) pun berjalan.

Beberapa instansi yang terlibat pada awal kegiatan antara lain adalah Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan



Foto: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

Kearsipan, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Mereka diminta menyiapkan data yang sebelumnya telah dibuat terpisah-pisah. Lalu mengubah data-data tersebut dalam format digital yang kemudian dituangkan dalam peta geospasial. “Semua lahan dan bangunan harus punya identitas biar mudah dikonversi.” pinta Mor.

Dari SiGita, Dikomando Hingga Jadi Panada

Melihat jumlah data yang membludak telah dimasukkan ke dalam sistem di tahun 2017 SiGita bertransformasi jadi Dikomando (Digitasi Kotaku

Manado). Cakupannya bertambah luas dengan konten informasi yang kian beragam. Aplikasi ini bisa diakses umum melalui website pemerintah kota di laman <http://bigdata.manadokota.go.id>.

Pemerintah Kota Manado juga kian serius mengerjakan ini dengan mendanai semua kebutuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 21,6 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu lebih banyak digunakan untuk pengadaan fisik. Seperti melengkapi peralatan di *Command Center* dan menyiapkan ruangan *big data* yang baru. Komando kemudian berkembang pesat sepanjang tahun 2017 dengan informasi termutakhirkan mengenai kondisi saat ini dan potensi wilayah serta konstelasi kebijakan pemerintah.



1



2



3



4

- 1 & 2 Pemerintah Kota Manado mengerahkan program KKN Mahasiswa untuk membantu Lurah dan Kepala Lingkungan dalam mengumpulkan data. Mereka mendatangi rumah warga satu per satu untuk mencatat informasi kependudukan yang diperlukan.
- 3 & 4 Sebuah perangkat kerja bernama Cerdas Command Center (C3) dibentuk Pemerintah Kota Manado untuk menghimpun dan mengolah data dan informasi berbasis pada data terintegrasi yang terdapat dalam portal analisis data berbasis peta atau dikenal dengan nama Panada. Pasca difungsikannya *command center* dan *portal* ini, pendapatan daerah meningkat dari pajak dan retribusi yang semakin efektif dan iklim industri yang semakin kondusif. Foto: **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

Atas perkembangan ini, Dikomando masuk ke dalam *masterplan* Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam program *quick win smart city* di Indonesia. Dengan sistem yang dibuat lebih lengkap dan *user friendly*, nama Dikomando kemudian berubah atas rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Portal Analisis Data Berbasis Peta dan disingkat Panada. “Panada diambil dari nama makanan khas dari Manado, biar ada ciri kedaerahannya,” celetuk Liny.

Menggerus Ego Sektoral

Menerjemahkan mimpi memiliki basis data yang terintegrasi untuk penyelenggaraan tata pemerintahan dan pemberian layanan yang tepat sasaran adalah hal yang tidak mudah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ego sektoral. Gaya kepemimpinan Wakil Walikota yang mengutamakan komunikasi para pihak dan koordinasi yang terus menerus, menjadi salah satu kunci utama yang berhasil menggerus ego sektoral.

Setelah sistem berdiri dan didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, persoalan serius yang kemudian dihadapi adalah memutakhirkan data-data yang telah ada disamping juga terus menerus menginput data baru.

Pemerintah Kota Manado lantas mengerahkan 504 Kepala Lingkungan (Pala) dari 87 Kelurahan. Para Kepala Lingkungan mendapatkan pelatihan seputar manfaat dan penggunaan sederhana sistem informasi geospasial. Mereka belajar membaca peta dan menggunakan aplikasi untuk menandai lokasi. “Kini 87 Lurah di Kota Manado telah kami latih dan dilengkapi dengan *smartphone* untuk memperbaharui data,” ujar Liny.

Selain itu Pemerintah Kota Manado juga melibatkan 423 mahasiswa Universitas Negeri Manado yang sedang menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu mengumpulkan data penduduk dan menginputnya ke dalam sistem.

Frida Endang Widyastuti, Kepala Lingkungan III yang berada dalam struktur kerja Kelurahan Sindulang Dua mengaku penerapan teknologi ini menambah mudah pekerjaannya. “Pada tahap awal, memang sangat banyak pekerjaan karena harus menginput data satu persatu,” katanya. Frida dibantu tujuh mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Manado.

Mereka mendatangi rumah warga satu per satu untuk mengumpulkan data kependudukan. Data yang terkumpul kemudian dicocokkan dengan data yang telah ada dan setiap perubahan data dicatat. “Data yang terus diperbarui memudahkan kami mengetahui kondisi warga yang bermukim dalam lingkungan ini”, aku Frida.

Satu Portal Data Beragam Manfaat

Ketika Portal Panada mulai difungsikan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manado ikut dinaikkan. Warga Kota Manado didorong untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehubungan dengan itu, seluruh Kelurahan di Kota Manado diminta sesegera mungkin menyelesaikan pemetaan objek wajib pajak di wilayahnya.

“Bila data ini rampung, kami juga yang akan menuai keuntungan dan kemudahan dalam bekerja, misalnya untuk memantau dan mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya,” kata Lurah Jerriel H. Tumiwa yang bertugas di Kelurahan Sindulang Dua.

Florentino C. Manalaysay, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) membenarkan adanya peningkatan pendapatan daerah pasca digunakannya portal ini. “Perubahan dari tahun 2016 ke 2017 ditunjukkan dengan bertambahnya data objek pajak setiap waktu,” kata pria yang akrab disapa Temmy tersebut.

Setelah pemerintah kota membenahi data, banyak wajib pajak yang dulunya tidak terdata bisa direkam kembali. Meningkatnya pendapatan daerah disebabkan oleh meningkatnya pembayaran tunggakan wajib pajak dan bertambahnya jumlah wajib pajak.

Rocky SR Rende, Tim Teknis Perizinan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) juga merasakan manfaat dari kehadiran Portal Panada ini. “Dulu kalau ada pengajuan izin kami harus turun ke lapangan dan bertanya ke orang-orang. Tapi sekarang sudah berbasis peta, kita bisa langsung meninjau peta dan melakukan analisa,” katanya.

Kehadiran Portal Panada ini cukup memengaruhi iklim industri di Kota Manado. Meski memiliki aplikasi sendiri, namun data-data DPM-PTSP langsung terkoneksi dengan Panada. Jadi semua data izin pendirian bangunan, usaha, restoran hingga toko kini telah dapat dapat diajukan dan diproses secara *online*.

Yohakim menjelaskan, data pembayaran pajak tersebut langsung terkoneksi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado. Ketika pajak telah dibayarkan, warna di peta digital akan berubah dari merah menjadi hijau. Data ini digunakan BP2RD untuk melakukan analisa dan menentukan tindakan yang diperlukan bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Sementara data yang bersifat umum atau bisa diakses semua kalangan berupa data kawasan rawan banjir dan longsor, data kependudukan tiap wilayah baik yang miskin serta status pendidikannya, hingga jenis sarana dan prasarana yang telah tersedia di kawasan tersebut.

Sudah banyak pihak yang memanfaatkan portal analisis data Panada ini. Panada tidak hanya diakses oleh instansi pemerintah yang hendak memantau perkembangan, tapi juga warga Kota Manado yang hendak membangun usaha. Informasi dalam portal ini dapat digunakan dalam perencanaan dan pemantauan kegiatan pembangunan.

“Beberapa warga pernah datang mencari informasi tentang lokasi tanah yang hendak dibelinya. Setelah dijelaskan ia kemudian punya gambaran soal harga dan potensinya,” cerita Olfie J. Mangindaan, Pejabat Pembuat Komitmen Bapelitbangda mengenai manfaat Portal Panada bagi warga Kota Manado.

Pengembangan demi pengembangan akan terus dilakukan. Di masa depan, selain menunjang basis data DPM-PTSP dan BP2RD, portal ini juga akan terkoneksi dengan data dan informasi kependudukan dari Dinas Catatan Sipil. Harapannya, setiap lahan akan terkoneksi dengan informasi kependudukan pemiliknya, termasuk nomor objek pajaknya.

Panada adalah awal dari setumpuk mimpi Pemerintah Kota Manado yang sedang mewujudkan. Semoga langkah yang tengah dirintis Pemerintah Kota Manado ini dapat terus terlaksana dan kelak menjadi bukti kekuatan pembangunan yang berbasis data di kawasan timur Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id



Tantangan Data Kependudukan di Papua

Oleh **SYAIFULLAH**

Tanpa data kependudukan yang akurat, warga kesulitan mengakses layanan dasar. Perencanaan dan penganggaran pun jadi tidak tepat sasaran. Inilah yang terjadi di Papua.



Salah satu syarat agar bisa menikmati manfaat program BANGGA Papua, warga harus terdaftar dalam data kependudukan yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan. Rupanya masih banyak sekali warga Papua yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan apalagi Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Kependudukan apalagi Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Tingkat kepemilikan akta kelahiran oleh anak-anak Papua pun masih rendah.

Papua dan Papua Barat menjadi dua provinsi dengan tingkat kepemilikan data kependudukan paling rendah di Indonesia. Papua menjadi yang terendah.

Menurut survei sosial dan ekonomi nasional 2017, hanya 45% anak Papua berusia di bawah 18 tahun yang memiliki akta kelahiran. Bandingkan dengan anak di DKI Jakarta yang 97,4% sudah memiliki akta kelahiran. Sementara untuk kepemilikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Papua hanya mencatat angka 68%. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata angka nasional yang mencapai angka 90% (Susenas, BPS RI, 2017) sekaligus menunjukkan betapa tertinggalnya Papua dalam soal data dan administrasi kependudukan.

Puluhan mama-mama berkumpul di halaman Bank Papua di kota Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai. Sebagian besar dari mereka membawa anak balita, ada yang di gendongan, ada pula yang dibiarkan berlari-lari di sekitar tempat mereka berkumpul. Halaman luas milik Bank Papua itu penuh oleh manusia. Beruntung karena Paniai adalah daerah dengan udara yang sejuk di ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Matahari yang bersinar terang pun tidak terlalu terasa membakar kulit.

Mama-mama ini adalah penerima manfaat program BANGGA Papua, sebuah program pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan memberikan bantuan dana dan pengetahuan kepada mama-mama asli Papua agar dapat menjaga dan meningkatkan gizi anak-anak mereka yang berusia di bawah 4 tahun.

Salah satu syarat agar bisa menikmati manfaat program ini, mereka harus terdaftar dalam data kependudukan yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan. Di sinilah tantangan bermula. Rupanya masih banyak sekali warga Papua yang belum memiliki Nomor Induk

Pentingnya Data dan Administrasi Kependudukan

Mengapa data dan administrasi kependudukan itu penting? Sederhananya, tanpa data kependudukan maka akan sulit bagi kita mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran pasti kesulitan mendaftarkan sekolah. Ini artinya mereka tidak bisa mengakses layanan pendidikan.

Bagi orang tua, tanpa NIK atau KTP akan banyak kesulitan yang ditemui, misalnya tidak bisa membuat rekening di bank, tidak bisa mengakses kredit, tidak bisa mengakses layanan BPJS dan lainnya. Bahkan diakui sebagai warga negara pun tidak. Kan tidak ada NIK? Bagaimana bisa diakui sebagai warga negara?

Dari sisi pemerintah beda lagi. Tanpa data kependudukan yang rapih dan termutakhirkan, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Ini karena kurangnya informasi mengenai jumlah warga dalam wilayahnya, termasuk informasi tentang jumlah warga yang sudah menikah, jumlah warga yang berusia anak-anak, hingga berapa banyak warga yang butuh



rumah sakit atau sekolah? Kalau data kependudukan tidak jelas, maka data yang dibutuhkan untuk perencanaan pasti juga ikut-ikutan tidak jelas.

Sampai di sini kita bisa paham kan betapa pentingnya data dan administrasi kependudukan itu, bukan? Sayangnya, hal itu belum dirasakan oleh banyak orang di Papua karena berbagai faktor.

Dari Pengetahuan sampai Faktor X

Tantangan terbesar untuk perbaikan data dan administrasi kependudukan di Papua adalah soal pengetahuan. Masih banyak warga yang belum paham pentingnya data kependudukan. Utamanya mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Bagi mereka, yang penting bisa makan tiap hari sudah cukup. Tidak perlu berpikir soal NIK, Kartu Keluarga, KTP, surat nikah atau akta kelahiran. Tidak merasa perlu atau tidak tahu kalau itu penting. Akibatnya masih banyak yang sama sekali belum berniat untuk mengurus semua data kependudukan itu.

Faktor geografis adalah tantangan tersendiri bagi pembangunan Papua. Papua adalah salah satu wilayah yang didominasi alam yang berat. Ratusan kampung masih masuk dalam kategori terpencil yang sulit diakses. Ini membuat banyak warga kesulitan mendapatkan informasi perihal pentingnya data kependudukan, dan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga kesulitan menjangkau mereka.

“Kita biasanya bikin layanan sampai ke hutan-hutan,” kata John, pegawai Dukcapil Kabupaten Asmat yang saya temani ke Koroway. John bercerita bagaimana staf Dukcapil Kabupaten Asmat sampai menyusuri sungai berjam-jam dan masuk ke kampung yang jauh di pelosok. Beberapa di antaranya masih di tengah hutan. Mereka bahkan pernah melakukan perekaman e-KTP untuk warga kampung Koroway yang sebagian masih tinggal di pohon.

Perjalanan mereka tentu tidak ringan dan butuh biaya besar. Belasan juta rupiah harus dikeluarkan untuk satu perjalanan pelayanan. Belum lagi tenaga yang terkuras dan bahkan kata John terkadang mereka harus menginap di tepi hutan.



Foto : Syaifullah

Tantangan terbesar untuk perbaikan data dan administrasi kependudukan di Papua adalah soal pengetahuan. Masih banyak warga yang belum paham pentingnya data kependudukan. Utamanya mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Sungguh perjuangan yang tidak mudah demi memenuhi hak warga untuk mendapatkan data kependudukan mereka.

Faktor lain yang juga menjadi tantangan adalah soal budaya. Sebagian orang Papua masih memegang budaya asli mereka, termasuk soal pernikahan. Pernikahan lazimnya dilakukan dengan cara adat tanpa pencatatan sipil. Padahal pernikahan itu harusnya tercatat dan menjadi bagian dari data kependudukan seorang warga negara. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir pernikahan adat ini, tapi sebagian lagi belum. Akibatnya, pernikahan adat masih dianggap belum sah seperti pernikahan di gereja ataupun di catatan sipil.

Dampak buruk dari belum diakuinya pernikahan adat ini paling terasa pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mereka tidak

bisa mengurus akta kelahiran karena orang tuanya belum memiliki surat nikah. Akhirnya, anak-anak tersebut tercatat sebagai anak ibu di Kartu Keluarga. Sepintas tidak masalah, tapi akibatnya buruk karena si anak kehilangan hak sebagai anak dari bapaknya.

Di beberapa daerah lain di Papua, ada juga faktor tantangan lain yang kita sebut saja sebagai faktor X. Ini terjadi di beberapa 'daerah merah' seperti Lanny Jaya atau Paniai. Di sana, segelintir warga yang enggan mengurus data kependudukan karena itu berarti mereka harus mengakui keberadaan Indonesia yang secara ideologis berbeda dengan yang mereka yakini. Beberapa warga lainnya segan mengurus dokumen kependudukan karena khawatir akan dikucilkan oleh tetangga dan lingkungan sekitarnya.

Di Paniai juga ada kasus penolakan lain. Ada sekelompok warga yang menolak perekaman e-KTP karena alasan yang ada hubungannya dengan kepercayaan. Mereka menganggap perekaman e-KTP itu sebagai perwujudan tindakan melawan Tuhan sebagaimana telah diwahyukan dalam Kitab Injil, yaitu saat nanti manusia akan dinilai sebagai angka, diberi tanda di tangan dan dahinya.

Tantangan-tantangan yang disebut di atas membuat masih banyak warga Papua yang tidak memiliki data kependudukan yang sah. Ini tentu berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran pembangunan di tanah Papua. Perencanaan dan penganggaran tidak tepat sasaran dan tidak bisa dinikmati hasilnya oleh warga. Semua berawal dari data kependudukan yang tidak akurat. Warga pun kesulitan mengakses berbagai layanan yang sudah disiapkan untuk mereka. Tidak bisa menjadi peserta BPJS, tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa mengakses perbankan, dan banyak lagi.

Sepintas, data kependudukan ini memang terlihat sepele. Kadang malah dianggap tidak penting karena tidak berpengaruh langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi, bila dikaji lebih lanjut ternyata peranannya besar sekali untuk menentukan kesejahteraan sebuah daerah. Tanpa data kependudukan yang rapi dan akurat, banyak kerugian yang siap menimpa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email ipul.ji@gmail.com dan tulisan ini dapat diakses melalui tautan <https://daenggassing.com/ceritaringan/data-kependudukan-papua/>

Replikasi Praktik Cerdas Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)

Oleh **NEHRU SAGENA**

Tiga masalah sosial yang dihadapi warga Desa Tarikolot, Kabupaten Bogor yakni terkait pendidikan, kesehatan dan sanitasi air bersih. Setelah adanya data SIPBM yang dihimpun oleh 28 orang pencacah yang terdiri dari unsur warga masyarakat desa (kader, pemuda, RT, RW) program pembangunan menjadi lebih variatif.

Pengelolaan data merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan. Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yang baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik pula.

Hal ini disadari oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggelar program pendataan bertajuk Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2004 yang dilakukan bersama UNICEF melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Program SIPBM dimulai dengan pendataan di enam desa di Kecamatan Tinambung dan lima desa di Kecamatan Tapango. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan anak usia 0 sampai 18 tahun dan hasil pendataannya menjadi bahan dasar perencanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

Telah banyak anak putus sekolah di Kabupaten Polewali Mandar yang berhasil dikembalikan ke sekolah dengan menggunakan data SIPBM. Pada tahun 2011 berhasil dikembalikan 2.316 anak ke sekolah, Jumlah ini sangat besar hingga diganjar

rekor MURI. Bahkan karena keberhasilannya di bidang pendidikan, sistem pendataan berbasis masyarakat ini kemudian diadopsi menjadi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat yang tidak hanya fokus pada isu pendidikan.

Keberhasilan ini pula, sehingga UNICEF kemudian memperkenalkan dan mereplikasi program SIPBM ke beberapa daerah, di antaranya di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Brestes Jawa Timur, di Aceh dan beberapa wilayah lainnya.

Di Kabupaten Bogor, melalui pendampingan UNICEF dan kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 7 desa diperkenalkan dengan sistem informasi ini pada bulan Mei tahun 2017. Salah satu desa dari 7 desa pilot SIPBM adalah desa Tarikolot. Desa Tarikolot adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia, desa yang dijuluki desa berdaya dan mandiri karena pengrajin logam dan non logam banyak dijumpai di sana.

Sebelum diperkenalkan dengan SIPBM, perencanaan pembangunan di desa Tarikolot dilakukan berdasarkan usulan wilayah dan fokus



Suasana Pelatihan Pendata SIPBM di Desa Tarikolot Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SIPBM mulai diperkenalkan pada tahun 2017. Sebelum menggunakan SIPBM, perencanaan pembangunan di Desa Tarikolot dilakukan berdasarkan usulan wilayah dan fokus pembangunan hanya pada infrastruktur.

Foto: **Sekretaris Desa Tarikolot**

pembangunan hanya pada infrastruktur. Tidak ada data masalah sosial dasar seperti data yang diperoleh dengan SIPBM. Tiga masalah sosial yang dihadapi warga desa tersebut yakni terkait pendidikan, kesehatan dan sanitasi air bersih.

Setelah adanya data SIPBM yang dihimpun oleh 28 orang pencacah yang terdiri dari unsur warga masyarakat desa (kader, pemuda, RT, RW) program pembangunan menjadi lebih variatif, diantaranya program kesehatan masyarakat seperti penanggulangan *stunting*, Imunisasi Balita, Penataan Sanitasi, dan Bantuan Sarana Air Bersih. Kemudian ada program pendidikan seperti pengembalian anak putus sekolah ke sekolah, beasiswa pendidikan sekolah paket A, B maupun

C. Untuk pendidikan sekolah paket, sudah ada 40 anak yang ikut serta.

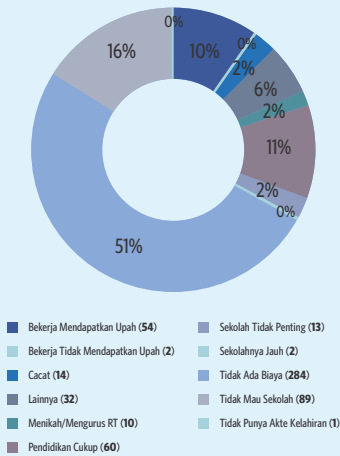
“Dengan melaksanakan SIPBM, perencanaan pembangunan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat, Karena langsung ke masalah sosial dasar yang memang nyata dialami masyarakat” ungkap Bapak Rian Hidayat, Sekretaris Desa Tarikolot.

Dengan adanya data dari SIPBM, pembangunan dengan menggunakan dana desa juga lebih tepat sasaran dan terukur karena digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam prosesnya pelaksanaan SIPBM, UNICEF senantiasa melakukan pendampingan.

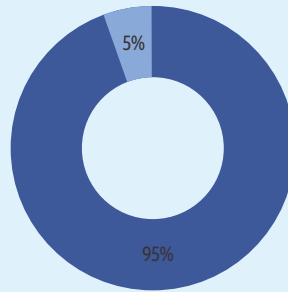
Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, SIPBM mulai diperkenalkan pada tahun 2017 melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Brebes dan UNICEF-UNNES (Universitas Negeri Semarang). Di awal, tantangan pembangunan yang ingin diselesaikan oleh Pemerintah Brebes adalah terkait isu pendidikan yakni tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data awal Disdikpora dan SIPBM tahun 2017, jumlah ATS di 17 kecamatan adalah 7.772 orang. Sebagai respon atas data tersebut, pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan FMPP (Forum Masyarakat

DATA-DATA YANG DIKUMPULKAN DARI PENDATAAN SIPBM DI DESA TARIKOLOT, BOGOR

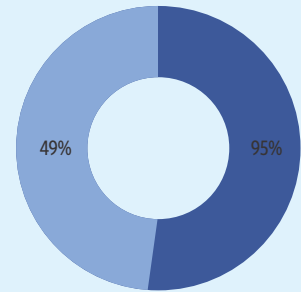
ANAK PUTUS SEKOLAH DAN PENYEBABNYA



IMUNISASI ANAK USIA 0 - 5 TAHUN



JUMLAH PENDUDUK



Sumber: <https://www.tarikolot.desa.id/sipbm/> Sekretaris Desa Tarikolot

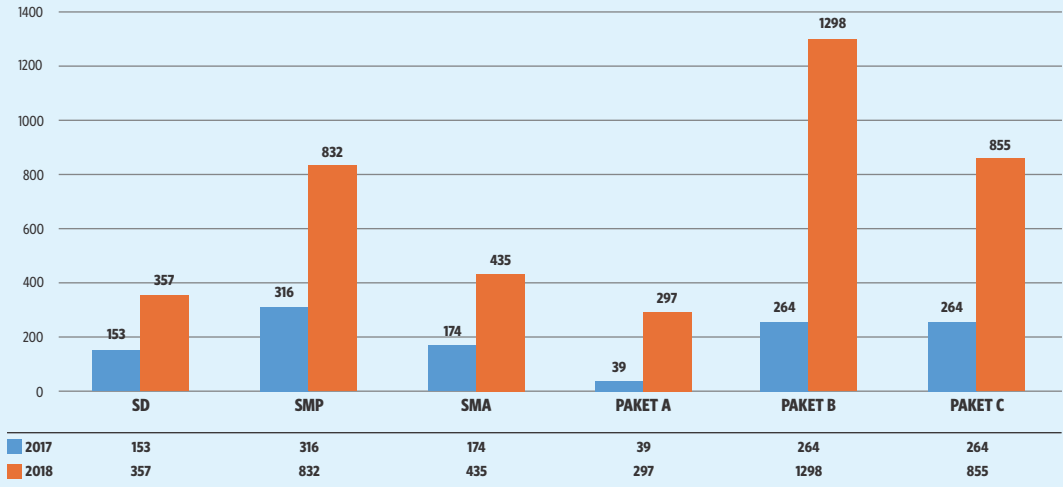


Wawancara oleh tim Kemendesa ke penerima manfaat program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Desa Tarikolot berdasarkan data SIPBM
Foto : **Sekretaris Desa Tarikolot**

Perduli Pendidikan), UNICEF, Kepolisian, media dan sektor swasta melaksanakan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

Melalui gerakan ini sebanyak 1.210 anak telah berhasil dikembalikan ke sekolah pada tahun 2017 dan 4.074 di tahun 2018. Sebagai payung hukum agar gerakan ini berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Bupati Brebes No. 115 tahun 2017 tertanggal 22 Desember 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan dua belas tahun Kabupaten Brebes serta

DATA ATS YANG DIKEMBALIKAN MELALUI GKB



Sumber : Forum Masyarakat Perduli Pendidikan (FMPP) Brebes.

diterbitkannya SK FMPP dan SK tim GKB. Kini di Brebes telah tersedia *baseline* data ATS dengan SIPBM yang dihimpun FMPP mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Gerakan ini juga sudah dianggarkan dalam APBD 2018-2022 serta dukungan APBDes dari Dana Desa mulai 2019.

Terkait dengan Dana Desa, SIPBM diintegrasikan dengan sistem perencanaan desa. Data dan informasi hasil SIPBM menjadi salah satu input dan masuk ke dalam dokumen data desa. Data dan informasi ini dibahas pada saat pengkajian keadaan desa/musyawarah penggalian gagasan mulai di RT, RW atau dusun sehingga menghasilkan usulan kegiatan yang akan dibawa ke musyawarah desa penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. Hasilnya, program GKB dialokasikan dalam ABPDes serta perencanaan desa mulai dibuat dengan memprioritaskan pembangunan pada isu-isu yang teridentifikasi melalui proses pendataan SIPBM.

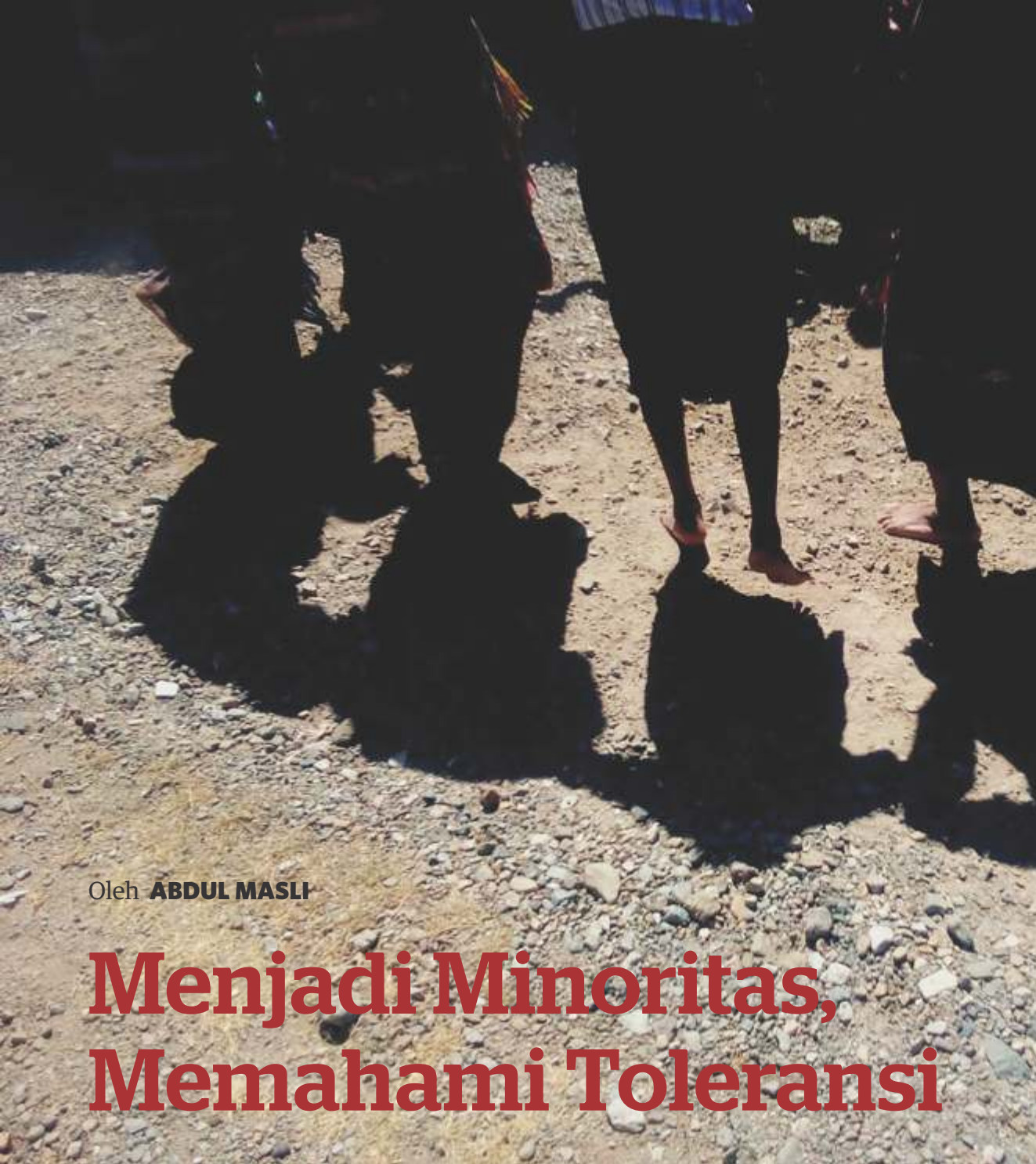
Lebih jauh lagi, SIPBM di Kabupaten Brebes memasuki level baru dalam penerapannya. Mulai tahun ini SIPBM akan dibuat berbasis digital. Jika sebelumnya dilakukan secara manual, UNICEF bersama Kemendes dan Kemendikbud memperkenalkan digitalisasi sebagai penyempurnaan. “Tahun ini SIPBM digital sudah mulai dilaksanakan dan targetnya pada tahun 2020 semua desa telah menggunakan data

SIPBM berbasis android” ungkap Bahrul Ulum, SE. M.Si Ketua FMPP Kabupaten sekaligus salah satu penggagas pemanfaatan program GKB. Tujuan digitalisasi ini adalah agar pengambilan kebijakan lebih mudah melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Harapannya dengan dilakukan secara digital, pengolahan, analisa data dapat dilakukan dengan cepat serta efisien dalam hal biaya serta waktu pelaksanaan pendataan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Ibarat berjalan dalam hutan, tanpa data kita akan kebingungan mencari arah hingga sulit tiba di tujuan. Dengan semakin banyaknya wilayah yang mereplikasi SIPBM harapannya perencanaan dan pembangunan yang berbasis data bisa lebih efektif, efisien dan tetap sasaran.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email nsagena@gmail.com



Oleh **ABDUL MASLI**

Menjadi Minoritas, Memahami Toleransi

Hentakan kaki yang lincah menerbangkan debu. Nyanyian silih berganti laki-laki dan perempuan memberi irama, menjadi musik pengiring tarian tebe, kesenian di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Tari Tebe adalah tarian masyarakat Belu yang merupakan luapan kegembiraan atas keberhasilan atau kemenangan dimana para pria dan wanita bergandengan tangan sambil bernyanyi bersahut-sahutan melantunkan syair dan pantun (kananuk) yang berisikan puji-pujian, kritikan atau permohonan, sambil menghentakkan kaki sesuai irama lagunya.

Foto: Abdul Masli



Menyaksikan tarian tebe, pikiranku lari pada imajinasi persatuan yang saling menguatkan. Terlihat dari ikatan melingkar yang terbentuk dari tangan yang saling merangkul. Meski goyang kiri dan kanan, meloncat dengan begitu lincah, namun ikatan tangan tidak pernah

terlepas. Posisi melingkar tetap terlihat rapi, meski gerakan kian cepat. Maju mundur, kiri dan kanan.

Kata Pak Dani, ikatan yang terbentuk dari berpegangan tangan itu berarti kita satu. Kita tidak boleh pisah. Karena kita di sini beragam, jadi tebe itu maknanya menyatukan. Tebe, tarian yang wajib ketika ada pesta. Katanya, bukan pesta jika tidak ada tarian ini.

Tebe hanyalah sepeinggal kekayaan budaya di Desa Kenebibi. Ada banyak kekayaan lainnya yang bisa disaksikan di sini. Kisah kehidupan dan kekayaan alam dapat kita jumpai. Semuanya menjadi kisah yang wajib dikenang. Kisah yang di dalamnya terselip pelajaran untuk menjalani kehidupan. Termasuk pelajaran hidup berdampingan meski ada perbedaan.

Selasa, 09 Juli 2019 menjadi hari kesembilan diriku berada di Desa Kenebibi. Desa dengan penduduk muslim sebagai minoritas, sementara Kristen sebagai mayoritas. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagiku, sekaligus menjadi moment untuk memahami arti toleransi secara langsung.

Teringat ketika masih di Makassar, ketika matahari tak lama lagi bersembunyi di ufuk barat, bersamaan datangnya warna keemasan di atas langit dan laut. Suara-suara dari toa masjid penanda waktu maghrib akan segera terdengar. Orang-orang dengan pakaian rapi, akan berjalan menuju masjid atau mulai masuk ke rumah.

Di tanah Timor ini berbeda. Suara adzan masjid menjadi pemandangan langka. Sebuah kebalikan dari kebiasaan diri ketika masih di Makassar. Aku bahkan duduk hingga gelap, baru tersadar bahwa waktu maghrib telah masuk. Di Atapupu, masjid hanya ada satu dan berada di dekat Pelabuhan, masuk dalam wilayah Desa Jenilu. Tepatnya di desa sebelah tempatku berada.

Karena perbedaan itu, tidak menjadi masalah bagiku. Sebab aku bisa menyaksikan langsung pembuktian atas pidato Wakil Bupati Belu ketika penyambutan, bahwa NTT berarti Nusa Toleransi Terbaik.

Selasa sore, usai mencoba permainan Bingo warga bersama Eki. Aku, Ashar, Erna, Eki, Erick, Mama Berta Induk semang Erna selama di sini, serta Emso pergi ke acara pernikahan di Sukaerlaran.

Ketika tiba, kami berjalan menuju pelaminan bersalaman dengan kedua mempelai. Setelah itu duduk di kursi yang telah disediakan. Kami duduk di kursi plastik barisan kanan menghadap kedua mempelai berada menyambut para tamu yang datang.



Beberapa warga Desa Kenebibi sedang bersantai sambil mengunyah sirih pinang.
Foto: **Abdul Masli**

Belum lama duduk, pemandu acara kemudian mempersilahkan pengantin maju ke dekat meja yang di atasnya terlihat kue yang bersusun tiga serta kue ulang tahun dengan lilin angka 57 di atasnya. Ada pula botol dan kaleng minuman di sekelilingnya. Dua kue tersebut akan dipotong oleh kedua mempelai serta saksi pernikahan yang juga sedang ulang tahun hari ini.

Sewaktu kedua mempelai berada di depan kue didampingi saksi pernikahan. Mempelai laki-laki menjawab pertanyaan pembawa acara, bahwa ia akan memulai potong kue mulai dari bawah. Makna dari prosesi tersebut nantinya diharapkan agar ikatan pernikahan mereka kuat mulai dari bawah, dan tidak akan terpisahkan oleh manusia.

Selesai sesi potong kue, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh pembawa acara langsung. Doa dilakukan sesuai ajaran Khatolik, sementara kami yang muslim menyesuaikan. Lagi-lagi aku merasakan bagaimana menjadi minoritas yang sebelumnya doa sering dipandu secara Islam dan yang lain

menyesuaikan. Tapi kini diriku yang menyesuaikan. Sebuah proses pembelajaran toleransi yang indah.

Selesai berdoa, tamu undangan kemudian dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang ada. Kami yang kemudian dianggap sebagai tamu terhormat dari UNHAS, disambut dengan sangat hangat. Pemandu acara seolah membaca pikiran kami yang beragama Islam, secara langsung mempersilahkan kami untuk menuju tempat yang disediakan khusus mengambil jamuan makan siang. Bukan untuk meminggirkan kami yang berbeda, tapi karena menghargai kami.

“Di sini kami orang Timor sudah budayanya. Kalau ada acara, pasti ada kami pisahkan makanan yang dagingnya ayam, sapi, atau kambing di potong oleh saudara kami yang muslim” ucap pemandu acara di tengah-tengah acara ketika mempersilahkan kami.

Kami pun berdiri lalu melangkah menuju rumah yang di sana telah disediakan makan siang. Sekali lagi, perasaan yang amat menghormati



kami, ketika berjalan menuju rumah, kami bukannya berjalan sendiri, tapi diantar oleh Emso yang pada umumnya ia beragama Kristen, justru menyantap makanan seperti yang kami santap.

Bukan hanya Emso, Pak Dusun Makfaho pun mengikuti kami hingga masuk rumah, untuk memastikan pelayanan yang maksimal kepada kami. Semua orang disekitar pesta kami lihat selalu tersenyum, memberi pesan ramah dan hangat akan kehadiran kami

Usai mengambil makanan, kami kembali duduk di tempat semula dan mulai menyantap makan siang. Sembari makan, pembawa acara tadi menghampiri dan berdialog dengan kami.

Kenebibi, bumi minoritas dan mayoritas melebur menjadi satu, cerminan nusa bersahabat. “Inilah kami orang Timor. Kalau ada acara kami jemput saudara muslim kami untuk menyembelih hewan. Sebab kami sadar mereka tidak makan babi. Setelah dipotong kami antar kembali. Nanti masak kami antarkan mereka. Di sini bukan hanya disembelih, mulai dari memasaknya hingga acara

seperti ini, sudah dipisahkan sejak awal” terang bapak pemandu acara.

Selama menikmati makan siang, kulihat di sekeliling sebagian orang telah selesai. Pemandangan baru kembali kulihat, dimana orang-orang yang biasanya ketika selesai makan berat, kadang menikmati kue-kue atau sekadar minum.

Di sini beda, orang-orang dengan ramai mengunyah sirih pinang. Bibir mereka terlihat merah seperti berdarah karena efek mengunyah sirih pinang. Nampaknya ini menjadi suguhan yang wajib, terlihat dari kotak-kotak kecil dengan pinang dan kapur di dalamnya tersebar di tengah-tengah tamu yang datang. Jadi jika ke NTT, mesti mencoba sirih pinang ini.

Selesai makan, kami diundang bergabung untuk melakukan tebe. Kami maju, membentuk lingkaran dengan kedua mempelai berada di tengah berdansa. Meski kaku, tapi orang-orang Kenebibi dengan sabar mengajarkan kepada kami gerakannya.

Aku turut serta dalam tebe hingga dua kali. Sementara Ashar, Erna, Eki, dan Erick hanya satu kali. ikut menari tebe cukup menyenangkan. Mungkin karena baru kali ini mencoba jadi gerakannya masih kurang sempurna. Bahkan keringat keluar melintasi sela-sela pori tubuh. Padahal kulihat penari lainnya biasa saja tanpa keringat.

Tapi di luar dari itu, diriku merasa sangat terhormat, kami disambut dengan rasa kekeluargaan yang penuh penghargaan dan penghormatan. Tanpa ada mimik membedakan dari wajah-wajah tuan rumah dan tamu undangan yang datang. Aku kini sadar, perbedaan adalah kekayaan yang mesti kita jaga, sebab itulah kekayaan bangsa kita. Satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Menghayati peristiwa di atas, ingatkanku lari pada pelatihan *active citizens* sebelum berangkat. Pelatihan yang berguna sebagai bekal khusus bagi kami 37 orang. Dalam pelatihan tersebut, kami diberikan materi tentang saling menghormati dan menghargai. Diajarkan untuk menjadi manusia layaknya air. Mampu mengisi dan menyesuaikan dalam setiap tempat. Kini yang kurasa, telah menjadi air untuk memahami makna toleransi meski hidup sebagai minoritas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan dapat dihubungi melalui email abdulmasli01@gmail.com



Perempuan Dalam Rantai Perdagangan Pala

Bagian 1

Oleh **BERNADINUS STENI**

Banyak perempuan di Fakfak kawin muda. Tak terkecuali mereka yang orangtuanya memiliki kebun pala. Isunya bukan semata uang. Tetapi, tidak banyak keluarga yang menempatkan pendidikan sebagai pilihan untuk meningkatkan kesadaran, atau tangga menaikkan status sosial.



Setelah tamat SD, sebagian perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pilihan di kampung tidak banyak. Selain bertani, berikutnya adalah menunggu waktu nikah. Alhasil, banyak yang memiliki anak di usia belia sekaligus menghadapi tugas ganda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala pekerjaan domestik dan sebagai ibu dari anak-anak.

Banyak yang mengkritik peran ganda sebagai masalah tradisi. Tradisi telah menempatkan perempuan untuk urusan domestik rumah tangga dalam batas-batas diskriminasi hak dan kemampuan yang seharusnya setara laki-laki.

Repetisi dan replikasi tradisi, menimbulkan ketimpangan gender dalam berbagai struktur sosial. Terutama ruang publik, seperti lemahnya partisipasi perempuan di tingkat pengambilan keputusan bersama. Namun, tradisi budaya melekat erat dari para leluhur untuk diteruskan ke generasi berikutnya.

Mengubah tradisi tidak bisa dilakukan sekejap. Pendidikan yang diharapkan mengubah kesadaran, tidak merata. Lebih tidak merata untuk perempuan. Ketika masih usia sekolah, mereka tidak mendapat peluang setara laki-laki.

Ketika menjadi ibu rumah tangga, mereka kesulitan menjalankan peran ganda efektif karena layanan dasar seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak dan transportasi publik tidak memadai.

Buah pala yang siap dipanen. Tanaman Pala menjadi komoditas utama masyarakat di wilayah Fakfak, Papua Barat yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah sangat dikenal.

Foto: **INOBU**

Transportasi publik sangat penting manakala mereka menghadapi masalah kesehatan bayi.

Dalam hal ekonomi, perempuan terlibat membantu rumah tangga, terutama pengelolaan pala pascapanen. Mereka terlibat dalam mata rantai pala yang menghubungkan dengan interaksi dagang lebih luas. Tidak hanya pada lingkup Fakfak, tetapi juga skala nasional dan global.

Perempuan dalam Mata Rantai Pala

Secara faktual, pala merupakan ekonomi yang mengandalkan perempuan. Dari biji hingga ke pengguna terakhir, perempuan adalah pelaku strategis yang menentukan produktivitas dan kualitas pala.

Meskipun tidak diberikan hak atas tanah pada kebun pala, perempuan mempunyai hak makan yang menggerakkan mereka untuk terlibat dalam ekonomi. Secara budaya, pala juga melekat pada karakter perempuan.

Baron van Hoevall pada abad ke-19, dalam catatan pribadinya, telah mengobservasi cerita rakyat bahwa pala dimitologikan sebagai manusia, seorang perempuan cantik [Turner, 2008].



Hingga kini, keyakinan itu masih nampak dalam sejumlah praktik budaya dan tutur lokal di kampung-kampung pala di Fakfak.

Kebun-kebun pala saat ini sebagian besar warisan orangtua. Hanya sedikit penanaman baru. Dalam dialog di Kampung Pangwadar, para petani menuturkan, tidak ada pembagian peran tegas antara laki-laki dan perempuan dalam penanaman dan pemeliharaan pala. Semua dilakukan tanpa memandang gender. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan: perempuan dilarang memanjat untuk memetik pala. Peran itu domain laki-laki.

Pascapanen, perempuan atau mama-mama terlibat lebih aktif. Tahap ini merupakan bagian paling krusial dalam pengelolaan menuju koneksi pasar. Di sini tingkat kebersihan, penataan tempat penyimpanan, pengeringan, penjemuran, hingga penjualan memerlukan peran mama-mama. Peralatan pengelolaan yang digunakan masih tradisional, seperti pisau hingga tempat penyimpanan yang masih warisan tradisi.

Pengeringan pala menggunakan teknik pengasapan atau penjemuran. Perempuan terlibat berkolaborasi dengan para pria untuk memastikan fase ini berlangsung sempurna. Pengasapan menggunakan kayu bakar, namun lebih sering sabut kelapa karena hasil pengapiannya dinilai lebih baik.

Setelah pengeringan, pala dijual ke pengepul lokal, pengepul utama dan pengepul keliling. Beberapa mama terlibat penjualan karena dipercaya keluarga mereka lebih mampu menyimpan uang ketimbang lelaki. Pendapatan itu digunakan untuk keperluan rumah tangga, bayar utang di toko, dan biaya sekolah anak.

Budidaya dan Budaya Pala

Berdasarkan survei Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU)-Aspirasi Kaki Abu untuk Perubahan (AKAPe) di Kampung Pangwadar, pada 35 dusun pala, luas rata-rata kebun per keluarga inti adalah 2,5 hektar. Luas terkecil 0,3 hektar, sementara terbesar 31 hektar. Petani pala usia 50-60 tahun mengatakan, dusun pala sudah ada sebelum mereka lahir.

Keluarga pemilik pala mendapatkan semua pengetahuan budidaya turun temurun. Menanam pala ibarat “mengawini” perempuan. Saat menanam, petani meminta izin kepada tanah dan para leluhur, memanjatkan doa:

“Saya tanam, saya punya hidup ada di kau, kau yang kasih makan saya sampai seumur hidup saya. Matahari naik, kau ikut naik ya...”

Di Pangwadar, semua petani mengatakan mewariskan pengetahuan budidaya pala ke anak-anaknya, melalui tutor maupun mengajak langsung ke kebun. Pengetahuan tradisional



Kiri : Fuli Pala yaitu selaput tipis merah cerah yang menutupi kulit buah pala.

Kanan : Perkebunan Pala di salah satu Dusun di kabupaten Fakfak. Foto: **INOBU**

merupakan perpaduan pengaruh masa lalu, informasi pedagang, petani, bahkan Pemerintah Belanda yang memberlakukan aturan ketat pemetikan pala layak panen.

Pengetahuan berputar di tengah keluarga dengan substansi yang tidak selalu sama dengan keluarga lain. Misalnya, metode menentukan jenis kelamin benih pala. Meskipun pengetahuan tradisional menganjurkan teknik penilaian visual, hasil yang ditunjukkan petani dalam satu garis keturunan cenderung memiliki kesamaan dengan petani keturunan berbeda.

Terkait tradisi, perubahan pengetahuan mendorong penggunaan teknik modern. Namun,

tidak semua komunitas bisa melakukan perubahan secara cepat. Sering, perubahan dipertanyakan karena tidak sejalan dengan praktik yang lumrah, berbiaya mahal, dan minimnya plot demonstrasi yang ditunjukkan ke petani.

Dinas Perkebunan setempat pernah mempromosikan teknik sambung pucuk (*epicotyl grafting*) di kampung Pangwadar dan kampung-kampung lain. Teknik ini 80% terbukti berhasil sebagai upaya dini menentukan jenis kelamin benih pala.

Sementara, teknik visual tradisional tidak selalu meyakinkan, harus menunggu di atas lima tahun baru bisa diketahui pohon pala jantan atau betina. Meski begitu, mereka lebih nyaman melanjutkan praktik tradisional, meski tiga petani di Pangwadar pernah mengikuti pelatihan teknik sambung pucuk.

Berikutnya, guna meningkatkan nilai tambah pala, beberapa inisiatif telah dilakukan dalam pembentukan UMKM. Melatih perempuan terampil mengelola produk pala, seperti membuat manisan, sirup, hingga sambal.

Untuk urusan ini, banyak perempuan terlibat dengan alasan membantu suami mencari penghasilan tambahan. Bila ada permintaan tambahan, mereka diminta memproduksi lebih banyak. Tantangannya adalah, UMKM bekerja layaknya buruh industri. Para mama terampil jadi pekerja, tetapi tidak dengan pasar.

Setelah bekerja beberapa tahun, mereka tidak tahu berapa sesungguhnya hasil kerjanya. Bahkan, mereka tidak paham orientasi pasar produk pala sesungguhnya. Para mama hanya diinformasikan bahwa pasar mereka kurang luas, sehingga tidak bisa memproduksi lebih banyak.

Mereka sendiri, belum memiliki pemahaman utuh mata rantai pala, mengapa organisasi perlu dibentuk, bagaimana menggerakkan organisasi secara partisipatif, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Singkatnya, para mama tidak menggerakkan organisasi, menentukan secara sadar ke arah mana melangkah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Sekretaris Inovasi Bumi (INOBU) dan artikel ini dapat dibaca pada tautan :

<https://www.mongabay.co.id/2019/06/29/perempuan-dalam-rantai-perdagangan-pala-bagian-1/>

Membuat Masalah Masyarakat Menjadi Masalah Pemerintah

Refleksi Seorang Mantan Bupati di Indonesia

Oleh **SUYOTO dan KARRIE MCLAUGHLIN**



Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi,

dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan Berorientasi Masyarakat

Sikap 'kita tidak bisa melakukannya' inilah yang saya coba hilangkan sewaktu menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, sebuah kabupaten dengan populasi 1,2 juta penduduk di Jawa Timur. Saya berupaya untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bojonegoro. Untuk hal ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat (dibandingkan



seperangkat indikator kinerja). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyediakan sebuah struktur untuk mengumpulkan data dan menelaah permasalahan di Bojonegoro, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan memahami posisi pembangunan kita sendiri.

Data lokal ini penting, akan tetapi belum bisa memastikan bahwa 'masalah masyarakat' diadopsi menjadi 'masalah pemerintah'. Untuk melakukan hal ini, kami harus menggunakan data tersebut dalam menyusun prioritas yang bermanfaat bagi kami.

Pemerintah daerah di Indonesia harus menyiapkan berbagai laporan tahunan untuk kementerian yang berbeda dan dengan visi yang berbeda. Kami dievaluasi berdasarkan beragam indikator, tapi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, Bojonegoro menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, termasuk banjir dan kekeringan. Namun,

Dulu mengurus izin usaha menjadi masalah bagi masyarakat Bojonegoro, tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah.

Foto: **Jerry Kurniawan/World Bank**

indikator evaluasi untuk kesiapsiagaan bencana alam lebih fokus pada kebakaran, sehingga akibatnya tidak sesuai dengan kebutuhan Bojonegoro.

Alih-alih hanya mengikuti indikator evaluasi nasional, data memungkinkan birokrat untuk memiliki informasi yang jelas tentang alasan mereka harus memberi fokus pada isu-isu setempat, antara lain pengendalian banjir. Hal ini membuat mereka berubah dari sekedar bertanggung jawab untuk sekedar mencentang kotak sekedar mengukur kewajiban, ke benar-benar mulai memenuhi beragam kebutuhan masyarakat di kabupaten.



Pemahaman yang jelas tentang masalah masyarakat juga dapat mengubah proses penganggaran. Sebelumnya anggaran kami selalu terlihat sama dari tahun ke tahun karena para Satuan Kerja Perangkat Daerah menyerahkan anggaran tahun sebelumnya dan hanya membuat sedikit perubahan. Saya menantang staf saya untuk memulai proses penganggaran dengan memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Bojonegoro. Kami menyebutnya 'penganggaran berbasis masalah'.

Selain itu, dengan berfokus pada masalah-masalah utama di daerah setempat, pembahasan

Kebijakan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat yang terlihat akan lebih bermakna bagi pemangku kepentingan daerah.

bergeser dari fokus pada anggaran menjadi fokus pada sumberdaya. Kedua hal ini sangat berbeda. Anggaran bersifat terbatas dan sangat politis. Sedangkan sumberdaya terdapat di setiap tingkatan yaitu pada individu, di desa, organisasi masyarakat, melalui tingkat kabupaten dan tingkat di atasnya.

Contoh yang baik dari proses ini adalah pengembangan Gerakan Desa Cerdas dan Sehat (GDSC). Selain menggunakan data yang dikumpulkan oleh lembaga statistik pemerintah, saya memulai proses pengumpulan data dari bawah ke atas (*bottom-up*), setiap desa di kabupaten diminta untuk mengumpulkan data



Mantan Bupati Kabupaten Bojonegoro, Bapak Suyoto atau akrab dipanggil Kang Yoto menjelaskan bahwa kebijakan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat yang terlihat akan lebih bermakna bagi pemangku kepentingan daerah.

Foto: **Tim Melayani/Yayasan BaKTI**

mengenai serangkaian indikator. Kinerja mereka dipantau dan diberi penghargaan terhadap peningkatan indikator-indikator tersebut.

Terus Memantau Kemajuan

Akhirnya, penting untuk selalu memantau kemajuan. Untuk melakukan ini, kami mengadakan *review* manajemen mingguan untuk membahas program-program prioritas. Kami juga mengembangkan aplikasi komputer untuk memantau kinerja program. Tapi, kami segera

belajar bahwa tanpa tindak lanjut secara *offline*, sistem komputer hanya menjadi sebuah kecanggihan tanpa arti yang tidak menghasilkan dampak nyata.

Demikian pula, selain menggunakan LAPOR versi setempat, yaitu sebuah aplikasi komputer yang dikembangkan secara nasional agar masyarakat melaporkan masalah, Pemerintah Bojonegoro juga mengadakan pertemuan mingguan setiap Jumat di balai warga agar semua orang bisa datang dan mengajukan pertanyaan.

Satu Model Strategis Tidak Dapat Diterapkan ke Semua Hal

Berdasarkan pengalaman saya di Bojonegoro, jelas bahwa memajukan hasil pembangunan di tingkat daerah mengharuskan pemerintah agar tidak menggunakan satu model strategis saja yang

diterapkan dalam semua hal, melainkan pemerintah daerah perlu menggunakan model yang memungkinkan untuk memahami dan menanggapi isu-isu dan karakter unik dari setiap desa dan kabupaten. Langkah-langkah yang kami lakukan juga dapat memperdalam pemahaman kita mengenai kerangka kerja yang disajikan dalam Laporan Pembangunan Dunia 2017, yang menyebutkan bahwa efektifitas suatu kebijakan didorong oleh komitmen, koordinasi dan kerja sama.

Bojonegoro menggunakan 'masalah masyarakat' dan orientasi penyelesaian masalah yang kuat untuk membangun komitmen dan koordinasi dukungan. Kebijakan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat yang terlihat akan lebih bermakna bagi pemangku kepentingan daerah. Diskusi rutin mengenai masalah-masalah tersebut di dalam pertemuan tiap Jumat memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik, dan juga mencari cara agar masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan Bojonegoro untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, kemudian mencari dan menyesuaikan solusi yang tepat, saat ini didukung oleh MELAYANI – program Bank Dunia yang mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan tantangan terkait dengan layanan dasar di Indonesia. Program tersebut memakai model pemecahan masalah secara iteratif/berulang dan adaptif (*Problem Driven Iterative Adaptation/PDIA*) sebagai instrumen tambahan untuk mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan, menerapkan dan menyempurnakan solusi.

Pejabat pemerintah internasional, nasional dan daerah berbagi pengalaman dalam menyusun dan menerapkan tanggapan terhadap masalah masyarakat di seminar eksekutif MELAYANI.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini dapat dibaca pada tautan <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/membuat-masalah-masyarakat-menjadi-masalah-pemerintah-refleksi-seorang-mantan-bupati-di-indonesia>

Kebijakan yang berpihak pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku

Bagian 1

Oleh **LUSIA PEILOUW**

Data yang menggambarkan realita kehidupan perempuan dan anak Maluku di tahun 2018 dan hingga pertengahan 2019 memperlihatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku. Kekerasan seksual terhadap Anak menempati posisi tertinggi disusul Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia dan mandat konstitusi, negara wajib mengambil semua langkah sebagaimana kewajiban dan kewenangannya untuk memastikan korban mendapatkan haknya antara lain perlindungan di hadapan hukum, pemulihan yang paripurna dan reintegrasi sosial. Sejauh ini, tanggung jawab negara terlihat pada penegakan hukum untuk kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan, utamanya di Polres Pulau Ambon PP Lease. Dukungan Pemerintah Provinsi baru terlihat melalui pembentukan dan penetapan kembali P2TP2A pada tahun 2018, tanpa dukungan sumber daya. Dukungan penuh terhadap korban justru utamanya datang dari lembaga-lembaga layanan yang digerakkan oleh masyarakat sipil. Sudah saatnya peta dukungan ini harus berubah. Negara (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku) harus mampu menjalankan mandat dan tanggung jawabnya untuk melindungi warganya, terutama perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dan segenap perundangan yang ada.

Korban yang dimaksudkan di sini adalah perempuan dan anak yang oleh sebab tertentu mengalami tindakan kekerasan baik fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi baik di ruang privat atau domestik maupun publik. Tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perendahan terhadap martabat perempuan, sebagian diantaranya adalah berupa tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan

secara hukum. Sementara, kebutuhan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, tidak terbatas pada aspek hukum semata.

Hukum dan perundang - undangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak telah diinstitutionalisasi dengan sangat baik. Penegakan hukum demi keadilan bagi korban sudah mulai ditata dan mengalami beberapa kemajuan. Kebijakan penegakan hukum yang bersifat vertikal, memudahkan daerah menyesuaikan kemajuan yang terbangun di tingkat Nasional. Sayangnya kemajuan dari sisi penegakan hukum ini, belum sejalan dengan kebijakan pemulihan bagi korban yang utamanya ditopang oleh pemerintah. Soal birokrasi dan kerumitan koordinasi antar bidang, serta *political will* eksekutif, masih menjadi kendala bagi korban mendapatkan dukungan dari beragam aspek seperti medis, psikologis, sosial dan ekonomi.

Perempuan dan Anak Maluku Dalam Kumparan Kekerasan

Tindak kekerasan yang melilit kehidupan perempuan dan anak Maluku kian hari kian membentuk kumparan kusut. Data penanganan kasus dari Polres Pulau Ambon PP Lease sebagai satu-satunya sumber data kajian yang menghasilkan risalah ini, mengemukakan sebuah realita yang miris. Sejak Januari 2018 hingga Juni 2019, setidaknya 434 perempuan dan anak Maluku mengalami tindak kekerasan dalam berbagai bentuk.

Di tahun 2018, tercatat 264 laporan polisi yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres P Ambon PP Lease. Sementara jumlah laporan polisi yang masuk pada pertengahan tahun 2019 memperlihatkan kenaikan yang sangat signifikan dimana angkanya sudah melebihi separuh dari angka total tahun 2018.

Rata-rata jumlah laporan tiap bulannya adalah pada kisaran 22 kasus. Ini berarti rata-rata setiap

Risalah Kebijakan (*Policy Brief*)

Risalah ini memuat angka-angka yang mungkin saja akan mencengangkan. Namun ini bukan tentang angka yang tertulis semata. Ini sesungguhnya tentang realita di dalam atau di baliknya. Soal bagaimana kepentingan harkat dan martabat perempuan dan anak diperjuangkan, harkat dan martabat perempuan dan anak korban, bagaimana luka lahir batin yang diderita oleh perempuan korban (dan anak/anak-anaknya) dan anak korban, bagaimana mereka harus berjuang untuk bangkit dari korban (*victims*) menjadi penyintas (*survivors*). Bagaimana lebih fatal lagi situasi mereka yang harus mengalami kekerasan (viktimsiasi) berkali-kali atau berlapis-lapis. Tidak semua realita dideskripsikan dalam narasi. Namun harapannya dapat dirasakan ekistensinya melalui angka-angka yang ada. Intinya, risalah ini ingin menggugah negara (Pemerintah Daerah) akan kewajiban yang mesti dipenuhi.

minggunya ada 4-5 kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (lihat Grafik 2).

Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Total kasus KTA yang dilaporkan tahun 2018 adalah 169 kasus. Angka ini naik 15% dari tahun 2015. Jadi, setiap tahunnya terjadi kenaikan 5%.

Grafik 1 memperlihatkan dominasi kasus KTA terhadap total laporan tahun 2018. Rata-rata 15 kasus diperkarakan setiap bulannya. Di dalam proporsi KTA, lebih dari separuhnya yaitu 57% adalah Kekerasan Seksual berupa Percabulan dan Persetubuhan terhadap anak. Sisanya adalah kekerasan fisik atau dalam dokumen laporan kepolisian dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Mayoritas kasus kekerasan fisik terjadi di sekolah. Sudah tentu pelakunya adalah guru.

Sebab yang paling umum terlihat adalah ketidak mampuan guru dalam mengendalikan emosi menghadapi peragai anak-anak didik, dimulai dari yang aktif, nakal dan bahkan bandel. Ini diperburuk dengan anggapan umum bahwa anak yang nakal ataupun bandel hanya bisa ditertibkan dengan sikap keras dari guru.

Persentase kekerasan seksual pada anak jauh lebih besar dibandingkan pada perempuan dewasa, seperti terlihat pada grafik 2. Yang lebih m e m p r i h a t i n k a n a d a l a h ditemukannya 3 (tiga) kasus inses (pelaku adalah ayah kandung) di dalam kasus setubuh anak. Anak menjadi sangat rentan dibandingkan perempuan dewasa, bahkan di rumahnya sendiri.

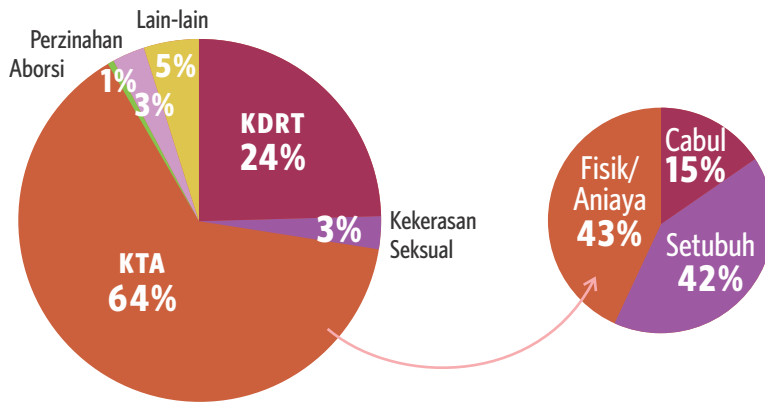
Fenomena KTA tidak bisa dilihat hanya pada angka 169. Pandangan kita mesti diperluas pada kategori kasus yang lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik maupun psikis yang dialami oleh ibu korban KDRT, b e r d a m p a k l a n g s u n g p a d a pengasuhan dan pendidikan anak. Apalagi pada kasus kekerasan ekonomi atau penelantaran dimana 8 dari 9 kasus yang dilaporkan melibakan anak (anak-anak) sebagai kelompok yang terpapar langsung terabaikannya tanggungjawab dari ayah. Dengan cara pandang yang

demikian, secara akumulatif setidaknya ada 232 anak yang menjadi korban kekerasan.

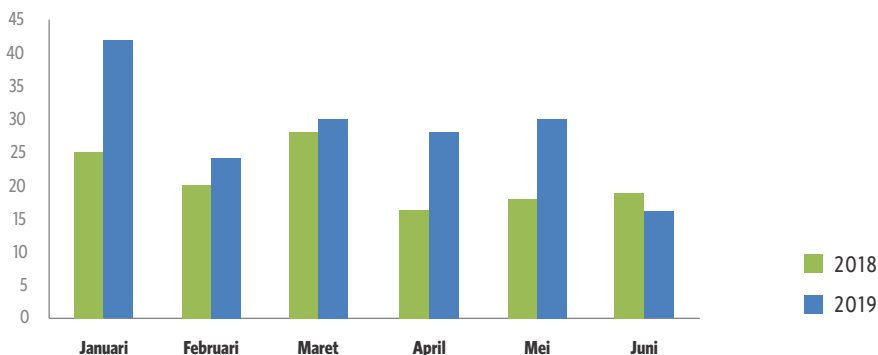
Lebih dari separuh korban kekerasan berada pada kisaran usia anak (di bawah 18 tahun). Sebagian kecil dari mereka adalah anak-anak usia emas yang hilang senyum manis dan keceriaan kanak-kanak bahkan terbelenggu cacat fisik, trauma dan dampak lainnya yang bukan tidak mungkin akan mengikuti mereka sepanjang hidup mereka ke masa depan. Kondisi mana membutuhkan pemulihan yang serius.

Mengenai pelaku, anak usia 12 tahun mulai teridentifikasi sebagai pelaku. 28 anak usia remaja terdata sebagai pelaku kekerasan seksual. Mereka merupakan korban dari lemahnya kontrol dan pendampingan orang tua (orang dewasa), sehingga terpapar dampak buruk pergaulan yang tidak sehat dan penggunaan teknologi komunikasi.

Proses hukum beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena berbagai alasan seperti



Grafik 1. Persentasi keseluruhan kasus & kasus kekerasan terhadap anak 2018



Grafik 2. Perbandingan jumlah laporan polisi di Januari - Juni 2018 dan 2019

kurang percaya diri ataupun ketakutan dari korban dan/atau keluarga, lemahnya pembuktian termasuk kesulitan mendapatkan saksi dan kelincuhan pelaku menghilangkan jejak. Inilah yang menjadi sebab suburnya impunitas, yaitu pelaku terlepas dari tanggungjawab hukum, sosial dan ekonominya.

Impunitas juga dapat dimudahkan oleh jarak pelaporan yang terlalu jauh dari waktu kejadian perkara. Untuk kasus kekerasan fisik, tanda bukti dapat saja hilang sehingga pelaku tidak bisa dijerat. Sedangkan pada kasus persetubuhan anak, waktu pelaporan yang terlalu jauh sangat merugikan korban, apalagi bila tindakan persetubuhan itu berakibat pada kehamilan.

Potensi Kenaikan Pada Tahun 2019

Seperti telah disampaikan di bagian awal bagian 2 ini, pada tahun 2018 terdokumentasi 264 kasus yang dilaporkan. Pada semester pertama 2019 jumlah laporan telah mencapai lebih dari

separuh jumlah kasus 2018, yakni sebanyak 170 kasus. Namun prediksi itu tentu bisa saja tidak terbukti, jika ada upaya-upaya preventif. Ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Sebagai organisasi perangkat daerah yang punya dukungan mitra kuat sekelas pusat-pusat studi yang berbasis di berbagai perguruan tinggi dan LSM-LSM berpengalaman di Maluku, harusnya bisa melakukan upaya *accelerative* dan strategis untuk itu.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis sehari-hari bekerja pada Dinas P2TP2A Provinsi Maluku dan dapat dihubungi melalui lusipeilouw@gmail.com



Sertifikasi Jamin Sejuta Ikan

Oleh **SITI ZALEHA SOEBARINI**

Ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar di Indonesia timur. Volume ekspor tahun 2017 mencapai 113.472 ton, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 194,1 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Negara tujuan ekspor produk perikanan Sulsel antara lain Belanda, Jerman, Inggris, Rusia, USA, China, Afrika, Jepang, Korea, Vietnam dan negara asia lainnya. Produk unggulan komoditi ekspor perikanan Sulsel antara lain udang, ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, gurita, rumput laut dan telur ikan terbang.

Salah satu persyaratan utama di negara tujuan ekspor adalah sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Di Sulawesi Selatan, sertifikasi pengujian mutu ini dilakukan oleh Balai Pembinaan, Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.

Namun dalam pelaksanaan sertifikasi terdapat masalah utama, yaitu waktu pelayanan pengujian yang memakan waktu lama sekitar 8-12 hari dan sertifikat pengujian harus diambil langsung oleh pemohon. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemohon dalam pengambilan sertifikat, antara lain lokasi kantor jauh dari pusat kota dan berada

di pinggiran jalan tol serta seringkali mengalami kemacetan, kondisi akses jalan rusak dan berlubang serta waktu yang harus dialokasikan oleh pemohon untuk mengambil sertifikat pengujian mutu dibutuhkan kurang lebih 1 hingga 2 jam jika tidak macet.

Lamanya waktu pelayanan pengujian ini dapat memengaruhi kelancaran ekspor maupun pengiriman produk hasil perikanan secara lokal. Sertifikat pengujian harus diambil langsung oleh masyarakat pelaku usaha perikanan (pemohon) Pada saat sertifikat pengujian mutu hasil perikanan selesai, pemohon harus datang kembali ke kantor Balai Pembinaan, Pengujian, dan Pengembangan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP3MPHKP) untuk mengambil sertifikat pengujian. Untuk datang ke kantor, pemohon harus menghadapi berbagai kendala dan hambatan.

Pada Desember 2016 Kepala BP3MPHKP, Siti Zaleha Soebarini dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai *Leading Sector* membuat solusi Inovasi “SEJUTA IKAN” untuk mempercepat proses Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Inovasi ini memecahkan masalah dengan mempercepat proses pelayanan sertifikasi pengujian dan mengantarkan langsung sertifikat kepada masyarakat pelaku usaha perikanan.

Inovasi ini hadir untuk menjawab masalah serta kendala yang ada. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat pelaku usaha perikanan dalam pelayanan pengujian dan pengambilan sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Inovasi ini memecahkan masalah dengan mempercepat proses pengujian di laboratorium dan pengantaran sertifikat langsung kepada masyarakat pelaku usaha perikanan. Inovasi ini merupakan pendekatan baru yang sangat berbeda dalam hal pelayanan pengujian serta pengantaran sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Dengan adanya inovasi ini, waktu pelayanan pengujian menjadi lebih cepat dan sertifikat pengujian diantar oleh petugas. Proses ini mempercepat kegiatan ekspor sehingga memudahkan masyarakat karena terjadi efisiensi waktu.

Selain itu, masyarakat pelaku usaha perikanan tinggal menyampaikan melalui telepon, *Short Message Service (SMS)* dan *Whatsapp* tentang waktu penyelesaian pengujian dan alamat



Foto : BP3MPHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan

pengantaran sertifikat. Selanjutnya petugas langsung mengantarkan sertifikat pengujian kepada pemohon. Layanan pengantaran ini tanpa dipungut biaya (gratis). Petugas pengantar sertifikat menggunakan kendaraan roda dua yang dilengkapi identitas khusus sehingga mudah dikenali oleh masyarakat pelaku usaha perikanan.

Pada awal Desember 2016 membuat perencanaan Inovasi dan melakukan sosialisasi secara internal kepada seluruh pegawai BP3MPHKP. Perencanaan meliputi rapat persiapan pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan strategi pelaksanaan. Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar inovasi ini dapat menunjang pencapaian tujuan dari Inovasi “SEJUTA IKAN”. Kemudian menyiapkan sumber daya manusia dalam hal ini petugas pengantar sertifikat yang berkompeten, dalam mengoptimalkan pelayanan pengantaran sertifikat. Hal ini bertujuan agar inovasi ini dapat berjalan baik dan memberi kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha perikanan dalam menerima sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Menyiapkan sarana prasarana di antaranya sistem *Local Areal Network (LAN)* yang memudahkan dalam proses administrasi pelayanan pengujian mutu hasil perikanan, menyiapkan kendaraan roda 2 (dua) yang dilengkapi dengan identitas khusus sebagai ciri khas petugas yang mempermudah petugas pada saat pengantaran sertifikat pengujian.

Implementasi Pelaksanaan Inovasi “SEJUTA IKAN” UPT BPMPP Sulawesi Selatan



Sumber: BP3MKPHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan

Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) Inovasi “SEJUTA IKAN”. SOP ini merupakan pedoman bagi petugas dalam pelaksanaan inovasi. SOP berisi langkah dan ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan pengujian dan pengantaran sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Tujuan utama SOP agar inovasi ini dapat berjalan maksimal dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pelaku usaha perikanan.

Pada awal Januari 2017 dilakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat pelaku usaha perikanan tentang proses sertifikasi dengan konsep Inovasi “SEJUTA IKAN”. Informasi ini bertujuan memudahkan dalam proses pelayanan pengujian dan pengambilan sertifikat pengujian mutu hasil perikanan.

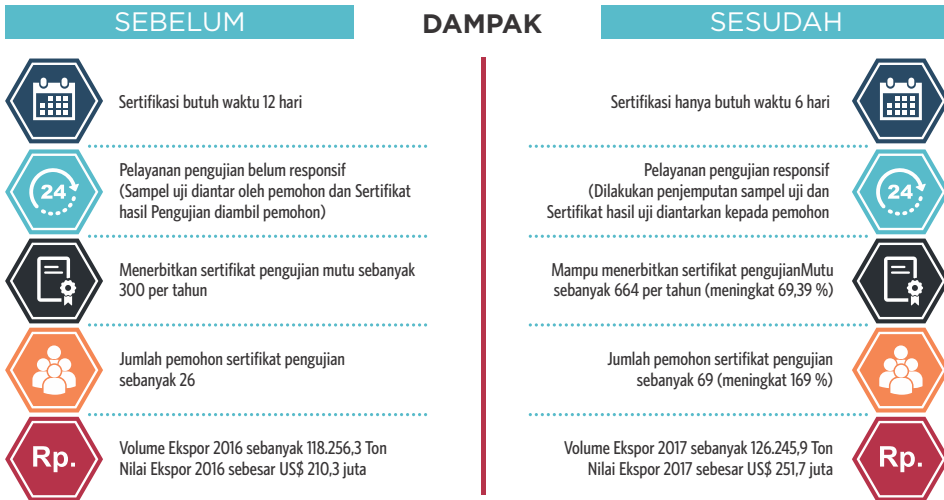
Penyebarluasan informasi dilakukan melalui spanduk, brosur, dan media sosial serta menyampaikan secara langsung. Hal ini bertujuan agar masyarakat pelaku usaha perikanan mengetahui tentang Inovasi “SEJUTA IKAN”. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan inovasi sebagai salah satu upaya keberhasilan Inovasi “SEJUTA IKAN.” Kerjasama ini di dilakukan dengan Balai Besar Karantina Ikan pengendalian mutu hasil perikanan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kerjasama dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengujian mutu produk hasil perikanan dalam hal menunjang penerbitan sertifikat ekspor produk hasil perikanan.

Pada awal Juni dan akhir Desember 2017 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pelaku usaha perikanan dengan menggunakan kuesioner, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan melihat tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Inovasi “SEJUTA IKAN”.

Beberapa hasil nyata dari inovasi “SEJUTA IKAN” diantaranya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan berhasil dipersingkat menjadi lebih cepat, dari sebelumnya 8-12 hari menjadi 6-10 hari. Sebanyak 664 sertifikat pengujian mutu hasil perikanan berhasil diterbitkan pada tahun 2017. Sebanyak 69 pemohon sertifikat pengujian mutu hasil perikanan dapat dilayani dengan baik dan tepat waktu pada tahun 2017.

“Dulu kami sering mengeluhkan tentang waktu pelayanan pengujian yang lama di kantor UPT BP3MPHKP, setelah adanya inovasi ini sangat membantu kami dalam waktu pengujian yang menjadi lebih cepat dengan proses yang mudah”, sekarang kami tidak perlu khawatir lagi tentang waktu pengujian yang lama semua dapat teratasi dengan inovasi ini dan ekspor produk kami berjalan lancar, dikarenakan sertifikat pengujian yang menjadi daya dukung dalam penerbitan sertifikat ekspor dapat selesai tepat waktu sesuai harapan kami” Sudarni Djawadi (PT. Chen Woo Fishery).

Inovasi “SEJUTA IKAN” merupakan program yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi BP3MHKP sebagai lembaga pengujian



Inovasi “SEJUTA IKAN” selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan strategi meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor.

Sumber: BP3MKPHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan

dan lembaga sertifikasi sistem mutu. Peningkatan pelayanan sudah masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3MPHKP. Karena itu, siapapun yang menjadi Kepala BP3MPHKP akan fokus dan berupaya memenuhi indikator tersebut. Mereka akan senantiasa memberikan pelayanan prima dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha perikanan.

Untuk memastikan Inovasi “SEJUTA IKAN” berjalan secara berkelanjutan maka diambil langkah-langkah sebagai berikut mempertahankan Akreditasi dan Sertifikasi sebagai lembaga pengujian ISO/IEC 17025: 2008 dan lembaga sertifikasi sistem mutu ISO SNI 9001: 2015 dengan program *surveillance* setiap tahun oleh Komite Akreditasi Nasional. Pengembangan inovasi Pelayanan Jemput Sampel pengujian produk hasil perikanan yang merupakan pengembangan dari Inovasi “SEJUTA IKAN” yang dimulai pada 2018. Program inovasi ini merupakan pelayanan pengambilan sampel pengujian. Pemohon tidak lagi harus mengantar sampel produk perikanan ke kantor BP3MPHKP. Tetapi, cukup memasukkan permohonan pengujian melalui fax, email maupun media sosial selanjutnya petugas pengambil contoh melakukan penjemputan sampel dan dilakukan pengujian sesuai parameter uji dari pemohon serta dilakukan pengantaran sertifikat pengujian mutu hasil perikanan. Terakhir, membuat sistem *online* pelayanan sertifikasi pengujian mutu hasil perikanan yang rencananya akan dilaksanakan

pada tahun 2019. Inovasi ini relatif murah biayanya dan memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Sehingga, sangat mudah direplikasi. Selain itu, inovasi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua lembaga sertifikasi pengujian mutu produk hasil perikanan di seluruh Indonesia terkhusus di Indonesia bagian timur sehingga produk perikanan Indonesia tetap mendunia.

Keberhasilan inovasi ini harus didukung oleh semua pihak baik internal maupun eksternal. Pihak internal adalah seluruh pegawai BP3MPHKP dan pihak eksternal yaitu masyarakat pelaku usaha perikanan yang menggunakan pelayanan ini.

Inovasi ini melalui proses seleksi, *coaching* yang dilakukan tim independen dari GIZ, BaKTI, Kompak, PKP2A LAN, STIA LAN yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Ortala bertindak sebagai *leading* sektor pelayanan publik yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan inovasi pelayanan untuk diikutsertakan pada kompetisi tingkat nasional melalui SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik).

Tujuan dari kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan dalam kegiatan seleksi dan *coaching* ini salah satunya adalah untuk menguatkan pencapaian *good governance*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email bpmpssulsel@gmail.com



NERACA PANGAN

Oleh **A.M. SALLATU**

Sejak bergesernya cara pandang ketahanan pangan dari FAA (*Food Availability Approach*) ke FEP (*Food Entitlement Paradigm*) secara konkrit, implementasinya perlu terdesentralisasi secara lebih mendasar. Tanggung jawab sudah sepatutnya diletakkan pada fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Keotonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kaitan ketahanan pangan, sepatutnya tidak lagi lebih banyak mengandalkan kebijakan, strategi dan alokasi program dari skala nasional. Melainkan benar-benar secara otonomi mampu mencerminkan inisiatif, prakarsa dan kemampuan untuk menyejahterakan masyarakat yang diayominya.

Foto: Yusuf Ahmad/Nayasan BaKTI

Masing-masing kabupaten dan kota dituntut agar mampu menyusun neraca pangannya sendiri.

Sedemikian rupa sehingga tercermin jelas dari waktu ke waktu unsur - unsur pangan yang menjadi kebutuhan mendesak di daerahnya.

Sampai saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam kerangka ketahanan pangan nasional pada kenyataannya di satu pihak banyak mengalami distorsi juga di lain pihak mengalami kebocoran dalam implementasinya. Di wilayah-wilayah yang mencatat perkembangan perekonomian yang maju dan surplus, masih ditandai dengan rawangizi pada kehidupan rumah tangga masyarakatnya. Itu berarti, ada struktur pemenuhan kebutuhan pangan yang luput dari perhatian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Hal ini tentu saja terkait dengan realitas kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakmerataan dalam perkembangan kehidupan ekonomi wilayah, yang nyaris menjadi realitas di semua wilayah. Tetapi pada kenyataannya, upaya untuk penanggulangan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakmerataan, disamping belum mampu dioptimalkan, juga rawan pangan dan gizi justru tetap mengancam.

Secara global, kondisi ketahanan pangan Indonesia kurun waktu 2012-2018 telah mengalami peningkatan. GFSI (Global Food Security Index) mencatat bahwa Indonesia pada tahun 2012 membukukan skor sebesar 46,8 naik menjadi 54,8 pada tahun 2018, skor tertinggi 100. Berarti, meskipun telah meningkat namun capaian tersebut masih cukup rendah. Skor aspek kualitas dan keamanan (44,5), serta skor faktor SDA (43,9) bahkan masih berada di bawah rata-rata skor

yang dicapai. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk dapat memperbaiki posisi relatif di Indonesia secara global.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten dan kota menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun masih lebih dari 20 persen kabupaten (81) dan kota (7) yang masih perlu mendapat prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Disamping patut dicatat bahwa baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kota, capaian skornya sangat timpang. Kabupaten Tabanan mencatat skor sebesar 88,30 sedangkan Kabupaten Nduga hanya mencapai skor 7,38. Kota Denpasar mencatat skor 92,81 sedangkan Kota Subulussalam hanya mencapai 21,50.

Capaian pada IKP mengindikasikan bahwa secara individual baik kabupaten maupun kota, tidak sepatutnya dibiarkan mengandalkan sendiri kemampuan daerahnya untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Ketahanan pangan, terutama dalam makna pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, sepatutnya menjadi permasalahan pokok provinsi atau bahkan lintas provinsi. Terdapat permasalahan sistem pengelolaan kebutuhan pangan secara wilayah pada skala provinsi yang harus dikembangkan secara lebih strategis. Dalam kaitan ini, wawasan konektivitas antar kabupaten dan kota dalam suatu provinsi bahkan lintas provinsi harus mampu dikedepankan.

Untuk maksud tersebut, secara keseluruhan masing-masing kabupaten dan kota dituntut agar mampu menyusun neraca pangannya sendiri. Sedemikian rupa sehingga tercermin jelas dari waktu ke waktu unsur-unsur pangan yang menjadi kebutuhan mendesak di daerahnya. Sejauh ini, Badan Ketahanan Pangan di daerah masih lebih banyak menggunakan pendekatan ketersediaan (FAA) dan lebih terkait dengan potensi sektor pertanian di masing-masing daerah. Padahal sekian lama telah dipahami bahwa pangan yang menjadi kebutuhan rumah tangga tidak hanya terkait dengan keberadaan sektor pertanian. Bahkan mungkin saja tidak banyak. Memang terlihat secara jelas bahwa masalah ketahanan pangan di daerah lebih merupakan penjumlahan permasalahan ketimbang mengedepankan permasalahan yang sejatinya bersifat menyeluruh dan terintegrasi.



Hal di atas, juga disebabkan karena kebijakan, strategi dan program ketahanan pangan masih lebih merupakan cetak biru yang menjadi arahan secara nasional. Padahal dalam kenyataannya, kebutuhan pangan rumah tangga di tanah air, cukup bervariasi baik antar wilayah maupun antar kabupaten dan kota. Dengan demikian, pada dasarnya pemenuhan kebutuhan pangan di setiap kabupaten dan kota, yang memahami dan menguasai permasalahannya adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota. Namun sejauh ini, keberadaan cetak biru yang menjadi arahan

nasional telah cukup membatasi ruang gerak inisiatif, prakarsa dan pengembangan kemampuan daerah otonom dalam kaitan ketahanan pangan.

Melalui neraca pangan, setiap kabupaten dan kota dapat mencermati kebutuhan dan pemenuhan pangan rumah tangga di daerahnya. Demikian pula tentunya kondisi dinamis ketahanan pangan daerahnya. Kebutuhan dan pemenuhan pangan daerahnya tentunya akan mendorong upaya kerjasama antar daerah yang memang merupakan arahan kebijakan nasional, terutama dalam menjaga dan memantau jaringan distribusi pangan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, sejauh menyangkut pangan yang menjadi kebutuhan rumah tangga masyarakat, dimana perlu pemerintah daerah, secara bersama maupun masing-masing penting untuk melakukan pengendalian pasar, baik melalui intervensi langsung maupun pemberian subsidi, agar mekanisme pasar tidak menekan dan menjerat kehidupan ekonomi rumah tangga.

Dalam kerangka makro, pemerintah provinsi tentu saja memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam pengendalian dan pengawasan, dan perlu memberikan dukungan bagi kabupaten dan kota demi mengangkat skor ketahanan pangan kabupaten dan kota di

wilayahnya. Terutama untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar kabupaten dan kota di wilayahnya. Berarti, inisiasi pemerintah provinsi untuk memfasilitasi dan menyupervisi penyusunan neraca pangan perlu segera didorong. Oleh karena pada akhirnya, neraca konsolidasi pangan diperlukan pada tingkat provinsi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti KTI dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com

Selama 15 tahun, majalah **BaKTI**News**** telah dicetak dan distribusikan ke pelosok Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Kini Anda dapat mengakses **BaKTI**News**** dari gawai Anda. Dapatkan informasi terkini tentang inisiatif dan praktik cerdas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Berbagai fitur menarik disajikan untuk memudahkan pembaca memilih artikel dari topik yang diminati. Anda juga dapat berkontribusi mengirimkan artikel ke redaksi majalah **BaKTI**News****. Segera kunjungi:

www.baktinews.bakti.or.id





Kegiatan di BaKTI

2 Agustus 2019

Sosialisasi Language Assistant Program (LAP) Western Australia 2020

Language Assistant Program (LAP) Western Australia 2020 telah dibuka. Program ini merupakan program dari Balai Bahasa Perth bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Australia Barat dan Departemen Pendidikan Australia Barat yang sedang mencari orang Indonesia untuk mengajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Australia Barat. Sebanyak 4 orang yang akan dipilih untuk kemudian diterbangkan ke Australia.

Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 2 Agustus 2019, Perpustakaan BaKTI mengadakan Kelas Sharing dan Sosialisasi Language Assistant Program (LAP) bersama alumni program LAP 2014, Andi S. Haruna. Kelas dibagi dalam tiga sesi, yaitu sesi sosialisasi, sesi bimbingan



pengisian aplikasi atau formulir, dan sesi *sharing*. Dalam sesi sosialisasi, Andi memperkenalkan program ini kepada para peserta yang hadir dengan merinci poin-poin penting dari program ini seperti persyaratan yang tercantum dalam *website* program LAP. Menurut Andi, dari semua persyaratan tersebut, yang mutlak adalah batas usia yang tidak boleh di bawah usia 29 tahun. Untuk persyaratan lain seperti latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa, masih fleksibel.

16 Agustus 2019

Diskusi dan Pemutaran Film "Pelangi di Bahonlangi"

Dalam rangka menyambut kemerdekaan, pada hari Jumat, 16 Agustus 2019, BaKTI dan Komunitas 1000 Guru Sulsel mengadakan Diskusi dan Pemutaran Film "Pelangi di Bahonlangi". Film ini merupakan film dokumenter persembahan 1000 Guru Sulsel dan mengisahkan tentang perjuangan seorang Ibu yang ingin memerdekakan anak-anak di kampungnya dari kebodohan dan buta aksara.

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, tapi nyatanya masih banyak daerah yang belum merasakan kemerdekaan itu. Salah satunya Dusun Bahonlangi di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada seorang ibu yang seorang diri mengajar 40 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dia adalah Ibu Halipa, Pelangi di Bahonlangi, yang datang memberi warna berbeda di dusun terpencil itu. Berlatar film



Pelangi Bahonglangi, 1000 Guru Sulsel telah banyak melaksanakan kegiatan sosial di Bahonglangi hampir di seluruh aspek Kehidupan masyarakat disana. Indonesia harus merdeka di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

26 - 29 Agustus 2019

Pertemuan Alumni Program INSPIRASI 2018

Sebanyak 8 peserta Program INSPIRASI 2018 telah menyelesaikan program belajar di New Zealand pada Desember 2018 lalu. Bertempat di Kantor BaKTI Makassar dan Pantai Bira Bulukumba Sulawesi Selatan diadakan Pertemuan Alumni Program INSPIRASI 2018. Dalam pertemuan ini seluruh peserta mempresentasikan hasil dari field work project mereka dan juga mendapatkan wawasan dari beberapa narasumber yang berbagi tentang politik dan kebijakan publik di Indonesia dan bagaimana kontribusi NGO/CSO, sustainable livelihood and pengorganisasian masyarakat, serta membangun dan memelihara jaringan. Alumni program ini juga melakukan refleksi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan proyek kerja lapangan dan bagaimana memperkuat jaringan alumni Program



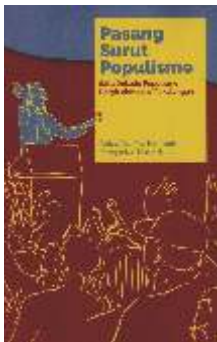
INSPIRASI. Program INSPIRASI - Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif didukung oleh Ministry of Foreign Affairs & Trade (MFAT) New Zealand yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Pemuda dan Olah Raga, UnionAID, Auckland University of Technology, dan BaKTI.



Media Sosial dan Demokrasi

PENULIS I Gusti Agung Ayu Kade Galuh

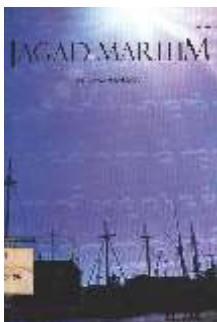
Tulisan ini mengkaji bagaimana sesungguhnya media sosial bermakna bagi aktivis gerakan. Penelitian dalam buku ini tidak berbicara mengenai peran media sosial sebagai saluran komunikasi di antara aktifis. Sebaliknya, media sosial justru dipandang sebagai salah satu strategi gerakan untuk mencapai tuntutannya. Lebih jauh, buku ini juga menjawab bagaimana proses transformasi aktifis media sosial menjadi gerakan nyata di Indonesia. Contoh kasus dalam buku ini adalah gerakan Bali Tolak Reformasi Teluk Benoa karena gerakan ini menjadi Gerakan Sosial Baru yang menggunakan media sosial sebagai salah satu strategi gerakan sekaligus mampu meneruskan tuntutannya melalui gerakan nyata.



Pasang Surut Populisme: Satu Dekade Populisme Basyir Ahmad di Pekalongan

PENULIS Anisa Nur Nia Rahmah

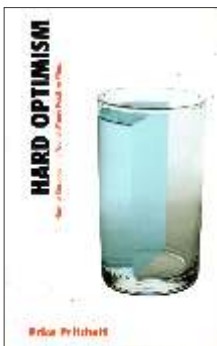
Belum banyak buku yang membahas populisme di Indonesia, padahal populisme merupakan fenomena yang mulai merambah perpolitikan nasional hingga lokal. Proyek riset Power Welfare and Democracy (PWD) menemukan bahwa ada kecenderungan untuk menggunakan skema patron-klien yang elitis. Di sisi lain, politik populisme menggunakan narasi-narasi kerakyatan untuk berposisi langsung dengan elit. Buku ini membahas secara detail bagaimana praktik populisme digunakan oleh Basyir Ahmad untuk terpilih dan mempertahankan kekuasaannya selama menjadi Walikota Pekalongan dua periode dari 2005-2010 dan 2010-2015.



Jagad Maritim

PENULIS Darmawan Salman

Pada awalnya adalah sederhana. Tiga komunitas maritim di Sulawesi Selatan, pembuat perahu, penangkap ikan, penghuni pantai wisata, memulai hidupnya dengan tatanan pra-kapitalis, sederhana dalam struktur dan tidak rasional secara kultur. Darmawan Salman lewat buku ini memapar bagaimana serbuan investasi, teknologi, dan manajemen mendorong perubahan di tiga komunitas ini. Bagaimana dua proses modernisasi utama: diferensiasi sosial pada aras struktural dan rasionalisasi tindakan pada poros kultural, kemudian ikut bergerak.



Hard Optimism

PENULIS Price Pritchett

Price Pritchett, salah satu pemikir budaya perusahaan dan perubahan organisasi paling terkenal di dunia, mempersembahkan sebuah program terobosan untuk mengembangkan praktik mental positif yang tidak hanya meningkatkan kinerja anda di kantor, tapi juga meningkatkan kualitas dari setiap hal dalam hidup anda. Memanfaatkan penelitian dari bidang yang berpengaruh dalam psikologi positif, Pritchett memperlihatkan anda bagaimana mengadopsi hard optimism, pola pikir maju yang menggabungkan ketahanan, energi, inovasi dan harapan.